

Nama : Saqila Rahma Andini
Npm : 2313031020
Matkul : Ekonomi Pendidikan

1. Analisis Struktur Pengeluaran

JAWABAN:

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum efisien karena 68% anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan guru, sementara kualitas pembelajaran, pemerataan pendidikan, dan infrastruktur digital masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan terlalu berorientasi pada biaya rutin dibanding investasi peningkatan mutu pendidikan. Ketimpangan distribusi guru antara kota dan desa memperparah inefisiensi karena terjadi surplus guru di perkotaan tetapi kekurangan di daerah terpencil. Oleh sebab itu, sebagian anggaran perlu direalokasi dengan menurunkan proporsi belanja pegawai secara bertahap menjadi sekitar 55–58% melalui redistribusi guru, digitalisasi administrasi, dan pembatasan perekrutan di wilayah surplus guru. Dana hasil efisiensi sebaiknya dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, penguatan literasi dan numerasi, bantuan siswa, serta pembangunan infrastruktur digital sekolah. Infrastruktur dan digitalisasi yang saat ini hanya memperoleh 12% perlu ditingkatkan menjadi sekitar 20% karena akses teknologi menjadi faktor penting dalam pemerataan kualitas pendidikan.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

JAWABAN:

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah sehingga rentan terhadap keterbatasan fiskal APBD. Untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan, pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dan menggunakan skema pembiayaan alternatif. Model yang tepat adalah public-private partnership (PPP) untuk pembangunan jaringan internet sekolah, laboratorium digital, dan penyediaan perangkat teknologi pendidikan. Selain itu, program corporate social responsibility (CSR) dapat diarahkan pada pemberian beasiswa, pelatihan guru, dan bantuan pendidikan daerah terpencil. Pemerintah juga dapat menerapkan blended financing, yaitu kombinasi dana

APBD, bantuan pusat, sektor swasta, hibah internasional, dan filantropi pendidikan agar pembiayaan lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada sumber fiskal daerah.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

JAWABAN:

Beberapa praktik negara OECD yang realistis diadopsi adalah performance-based budgeting, pendanaan berbasis kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan, dan penggunaan sistem evaluasi berbasis data pendidikan. Performance-based budgeting memungkinkan anggaran dialokasikan berdasarkan capaian pendidikan seperti peningkatan literasi, numerasi, dan pemerataan mutu sekolah. Pendanaan berbasis kebutuhan siswa juga penting agar sekolah di daerah miskin dan terpencil memperoleh dukungan anggaran lebih besar dibanding sekolah yang sudah maju. Namun, penerapan sistem tersebut di Indonesia menghadapi tantangan seperti kualitas data pendidikan yang belum akurat, kapasitas birokrasi daerah yang berbeda-beda, resistensi terhadap perubahan sistem anggaran, rendahnya literasi digital guru, serta faktor politik lokal dalam distribusi anggaran dan penempatan tenaga pendidik.

4. Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

JAWABAN:

Reformasi pembiayaan pendidikan selama lima tahun perlu dilakukan secara bertahap dengan fokus pada efisiensi, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Struktur belanja baru dapat diarahkan menjadi sekitar 58% untuk gaji dan tunjangan, 20% untuk infrastruktur dan digitalisasi sekolah, 12% untuk peningkatan kualitas guru, 8% untuk bantuan siswa, dan 2% untuk monitoring serta evaluasi berbasis data. Pada tahun pertama pemerintah melakukan audit anggaran pendidikan dan pemetaan distribusi guru serta kondisi sekolah. Tahun kedua difokuskan pada redistribusi guru dan pembangunan akses internet sekolah daerah terpencil. Tahun ketiga mulai diterapkan performance-based budgeting berbasis indikator pendidikan. Tahun keempat memperluas penggunaan pembelajaran digital dan sertifikasi

kompetensi guru. Tahun kelima dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak reformasi terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan.

5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

JAWABAN:

Monitoring dan evaluasi reformasi pendidikan harus dilakukan berbasis data agar kebijakan dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu membangun dashboard pendidikan provinsi yang memuat indikator utama seperti skor literasi dan numerasi siswa, rasio guru-siswa, distribusi guru, akses internet sekolah, tingkat kehadiran guru, serta ketimpangan kualitas antara kota dan desa. Evaluasi dilakukan setiap semester dengan melibatkan dinas pendidikan, sekolah, dan lembaga independen agar hasilnya transparan. Sekolah yang menunjukkan peningkatan kinerja dapat memperoleh insentif tambahan, sedangkan sekolah dengan capaian rendah mendapatkan pendampingan khusus. Sistem monitoring berbasis data ini penting agar anggaran pendidikan benar-benar berorientasi pada hasil belajar siswa dan pemerataan kualitas pendidikan.